

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teoretis

##### 1. Cerita Legenda

Cerita legenda merupakan salah satu bentuk cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat dan dipercaya sebagai kisah nyata yang terjadi pada masa lalu. Menurut Danandjaja, legenda adalah bagian dari budaya yang mengandung unsur sejarah, budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Legenda biasanya mengisahkan asal-usul suatu tempat, benda atau tokoh yang sangat berkaitan erat dengan identitas budaya dan geografis suatu wilayah. Dalam konteks di Kabupaten Banyumas, legenda-legenda *Nyai Gede Tambak*, *Raden Kamandaka* atau *Ki Ageng Selo* tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana penanaman nilai-nilai moral, spiritual dan sosial.

Legenda menyimpan struktur sosial dan pandangan masyarakat tentang hubungan antar manusia, termasuk dalam hal relasi gender. Cerita legenda sering kali memosisikan tokoh laki-laki sebagai pusat kekuasaan atau yang paling berkuasa, sedangkan tokoh perempuan berada pada posisi marginal, pasif atau yang dikorbankan. Hal ini, menunjukkan bahwa cerita legenda dapat merepresentasikan sistem nilai yang berlaku di zamannya, sekaligus membentuk cara pandang generasi penerus terhadap perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, cerita legenda dapat menjadi sumber penting untuk mengungkap ideologi tersembunyi dalam narasi budaya lokal.

Dalam pembelajaran teks cerita rakyat di sekolah, cerita legenda dapat digunakan sebagai media untuk mengasah kemampuan literasi sekaligus membentuk kepekaan terhadap persoalan sosial, termasuk

isu kesetaraan gender. Dengan menganalisis legenda secara kritis, peserta didik dapat diajak untuk tidak sekedar memahami isi cerita secara tekstual, tetapi juga kontekstual yakni untuk menelaah bagaimana nilai-nilai posisi tokoh, dan relasi kuasa direpresentasikan dalam teks. Hal ini sesuai dengan semangat kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran berpikir kritis, reflektif dan kontekstual.

a. Pengertian Cerita Legenda

Cerita legenda merupakan salah satu bentuk prosa yang berkembang di masyarakat dalam tradisi lisan dan digunakan untuk menjelaskan asal-usul suatu tempat, peristiwa, tokoh dan fenomena alam. Legenda dianggap memiliki hubungan dengan sejalan dan dipercayai oleh masyarakat sebagai peristiwa yang pernah terjadi meskipun bercampur dengan unsur imajinatif. Menurut Sulianto et al., (2016), legenda merupakan cerita tentang kejadian suatu daerah tertentu dan sering kali dipercaya kebenarannya oleh masyarakat.

Legenda juga memiliki ciri khas yang berupa keterkaitan dengan lokasi atau tokoh tertentu yang menjadi pusat cerita. Menurut Aini dan Widayati (2019) menjelaskan bahwa legenda tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas karena mengandung norma, nilai moral dan pandangan hidup masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, legenda sering menjadi bagian yang sangat penting dalam penguatan karakter budaya yang ada di daerah.

Menurut Setiawati & Kurniawan, (2024) legenda memuat konstruksi gender yang memposisikan perempuan dalam stereotip tertentu, seperti halnya lemah, pasif atau tunduk pada otoritas laki-laki. Legenda dapat dibaca sebagai teks yang mengungkapkan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan sebagai budaya lokal.

## b. Unsur-Unsur Pembangun Cerita Legenda

Cerita legenda dibangun oleh unsur-unsur intrinsik yang membentuk keseluruhan makna dan struktur naratifnya. Unsur-unsur ini bekerja secara terpadu untuk menyampaikan pesan budaya, nilai moral, hingga identitas masyarakat pendukungnya. Menurut Aini & Widiyati (2019) unsur pembangun legenda perlu dipahami bukan sekedar struktur cerita, tetapi juga sebagai konstruksi budaya yang mempengaruhi representasi tokoh dan nilai-nilai sosial di masyarakat.

Unsur pertama yaitu tema. Tema menjadi landasan utama yang menggerakkan cerita. Tema pada cerita legenda umumnya berkaitan dengan asal-usul tempat, tokoh, atau peristiwa yang memiliki nilai historis maupun spiritual. Tema sering mendukung pesan moral dan gambaran pandangan hidup masyarakat setempat. Kedua unsur tokoh dan penokohan. Unsur ini sangat penting dalam menggambarkan karakter dan nilai yang ingin disampaikan. Tokoh legenda pada umumnya bersifat simbolik, seperti pahlawan, bangsawan atau makhluk gaib serta pembentukan karakternya sering mencerminkan nilai budaya tertentu, termasuk pola relasi gender yang tampak dalam representasi perempuan dan laki-laki.

Ketiga yaitu unsur alur, alur cerita menggambarkan rangkaian peristiwa membentuk cerita legenda. Alur cerita legenda biasanya sederhana dan linier, dimulai dari pengalaman tokoh hingga penyelesaian konflik yang menjelaskan asal-usul tempat atau tradisi tertentu. Keempat yaitu unsur latar. Latar meliputi latar tempat, waktu dan suasana yang berkaitan langsung dengan lokasi geografis masyarakat pendukung cerita. Latar menjadi identitas yang sangat penting karena legenda hampir selalu berkaitan dengan tempat tertentu.

Selain itu ada unsur amanat atau pesan moral yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan nilai kehidupan, nasihat moral atau ajaran yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya. Pesan dalam legenda dapat berupa ajakan untuk berbuat baik, larangan tertentu atau penghormatan terhadap leluhur. Terakhir, ada unsur gaya bahasa dalam legenda berasal dari tradisi lisan, namun tetap memiliki fungsi estetik dan simbolik yang memperkuat struktur legenda yang bukan hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai-nilai budaya masyarakat.

## **2. Analisis Wacana Kritis**

Analisis Wacana Kritis (AWK) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi dalam bahasa. Salah satu tokoh penting dalam AWK adalah Mills (2007). Mills menawarkan pendekatan berbasis perspektif feminis. Beliau menekankan pentingnya melihat bagaimana tokoh-tokoh dalam teks diposisikan menjadi siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objek dan siapa yang memiliki kontrol atas narasi. Dalam banyaknya kasus, posisi perempuan dalam wacana seringkali ditempatkan sebagai objek pasif atau subordinat yang suaranya tidak terdengar atau bahkan dibungkam.

Mills menekankan bahwa narasi tidak pernah netral. Pemilihan kata, struktur kalimat hingga fokus penceritaan merupakan bentuk representasi ideologi, baik secara sadar maupun tidak. Oleh karena itu, dalam konteks cerita legenda rakyat pendekatan Mills menjadi sangat relevan untuk melihat bagaimana peran perempuan dikonstruksikan dalam budaya lokal. Dengan menganalisis struktur naratif, dapat diungkap sejauh mana perempuan diberi ruang untuk menjadi subjek aktif atau justru dijadikan objek yang dipinggirkan. Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Eriyanto (2015) yang

menyebutkan bahwa analisis dalam studi linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal (yang lebih memperhatikan pada unit kata, frasa, dan kalimat semata tanpa melihat keterkaitan di antara unsur tersebut). Analisis wacana adalah kebalikan dari linguistik formal, karena memusatkan perhatian pada level di atas kalimat, seperti hubungan gramatikal yang terbentuk pada level yang lebih besar dari kalimat.

Sebagai pelengkap, digunakan juga teori ketidakadilan gender dari Fakih (2020), yang mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Teori ini membantu mengklasifikasikan perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang sering muncul dalam wacana budaya, termasuk dalam cerita legenda. Gabungan pendekatan Mills dan teori Fakih memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap struktur teks sekaligus konteks sosial budaya yang melingkupinya. Hal ini sangat penting untuk menggali kesadaran kritis peserta didik dalam pembelajaran berbasis literasi gender.

### **3. Teori Representasi**

★ Representasi merupakan konsep sentral dalam kajian budaya dan sastra karena berkaitan dengan bagaimana realitas dibangun, ditampilkan, serta ditafsirkan melalui bahasa, simbol, maupun narasi. Hall dalam Hermayanthi (2021) menyatakan bahwa representasi adalah praktik produksi makna yang diwujudkan melalui sistem tanda, sehingga berfungsi sebagai sarana dalam membentuk realitas sosial. Dengan demikian, representasi bukan sekadar cerminan realitas, melainkan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh ideologi dan konteks budaya tertentu.

Dalam karya sastra, representasi terlihat melalui cara pengarang menghadirkan tokoh, baik dari segi karakter, peran, maupun

kedudukan sosialnya. Representasi perempuan menjadi salah satu isu penting karena memperlihatkan bagaimana masyarakat memandang posisi dan peran perempuan. Menurut Gusni (2025), perempuan dalam karya sastra seringkali ditampilkan melalui dua wajah: di satu sisi digambarkan sebagai sosok yang kuat, cerdas, dan mandiri; di sisi lain, masih kerap ditempatkan pada posisi subordinat melalui stereotip, marginalisasi, atau domestikasi.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa representasi perempuan tidak pernah netral. Susanto dalam Sugiarti, Fida Pangesti (2022) mengungkapkan bahwa penggambaran tokoh perempuan dalam cerita rakyat merupakan hasil dari konstruksi sosial yang merefleksikan budaya patriarki masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa representasi tidak hanya menghadirkan tokoh atau alur, melainkan juga menjadi medium untuk memahami ideologi, nilai budaya, serta relasi kuasa dalam masyarakat.

Dengan demikian, analisis terhadap representasi perempuan dalam cerita rakyat Banyumas menjadi penting, sebab dapat mengungkapkan bagaimana masyarakat membangun citra perempuan dalam tradisi lisan, sekaligus merefleksikan sistem nilai yang berlaku, termasuk adanya dominasi patriarki dan konstruksi sosial yang melekat pada peran perempuan.

#### a. Perwujudan Citra Perempuan

Perwujudan citra perempuan dalam teks sastra merupakan bagian dari proses representasi yang menggambarkan bagaimana perempuan diposisikan, di dipersepsikan dan dimaknai dalam konstruksi sosial. Menurut Hall dalam Hermayanthi (2021) menjelaskan bahwa representasi adalah proses produksi makna melalui bahasa, simbol dan teks sehingga dapat menggambarkan budaya, ideologi dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, citra perempuan dalam legenda sering mencerminkan pandangan masyarakat terhadap

tokoh yang diberi sifat-sifat tertentu sesuai dengan ideologi budaya yang berkembang.

Citra perempuan dalam pandangan feminisme tidak pernah lepas dari relasi kuasa patriarki yang mengatur cara perempuan diposisikan dalam teks. Fakih menyatakan bahwa sistem patriarki mendorong penggambaran perempuan sebagai pihak yang subordinat dan terbatas ruang gerakannya. Menurut Mills, perempuan sering menjadi objek sebagai narasi dan bukan sebagai subjek yang memiliki suara, sehingga pengalaman mereka tidak ditampilkan secara utuh. Dengan demikian, perwujudan citra perempuan dalam legenda adalah hasil dari konstruksi budaya yang membentuk cara masyarakat memahami identitas perempuan, sekaligus memperlihatkan bagaimana, nilai-nilai patriarki dapat diwariskan dari generasi ke generasi melalui teks cerita rakyat.

b. Sistem Nilai

Teori representasi memandang sistem nilai sebagai seperangkat norma, keyakinan dan pandangan hidup yang direfleksikan melalui teks, simbol dan praktik budaya. Menurut Hall dalam Hermayanthi (2021) representasi adalah proses produksi makna yang tidak netral, makna selalu dibentuk oleh nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam konteks karya sastra, termasuk legenda, sistem nilai hadir melalui penggambaran karakter, konflik, dan pesan moral yang mencerminkan cara pandang suatu komunitas terhadap kebaikan, keburukan, kehormatan, kekuasaan, hingga relasi sosial. Dengan demikian, legenda berfungsi sebagai media penyampai nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus memperlihatkan bagaimana masyarakat memahami dunia dan mengatur perilaku anggotanya.

Sistem nilai dalam legenda tidak hanya dilihat sebagai

pedoman moral, tetapi juga sebagai konstruksi ideologis yang menentukan bagaimana peran gender dibentuk dan legitimasi. Fakih menegaskan bahwa sistem nilai patriarki yang mengakar dalam masyarakat sering tampak dalam representasi perempuan, misalnya dalam bentuk pembatasan ruang gerak, penekanan pada kepatuhan, atau stereotip tertentu. Mills juga menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut muncul melalui pemilihan sudut pandang, peran tokoh, serta narasi yang menempatkan perempuan sebagai objek. Dengan demikian, sistem nilai dalam legenda tidak hanya mencerminkan tradisi, tetapi juga menjadi mekanisme budaya yang melanggengkan ideologi gender dan struktur sosial di dalamnya.

c. Sistem Dominasi

Dalam kajian representasi modern, sistem dominasi dipahami sebagai mekanisme budaya yang mengatur produksi makna sehingga kelompok tertentu tampil lebih berkuasa daripada kelompok lainnya. Menurut Pangestu et al. (2025), representasi dalam teks sastra dapat menjadi alat pembentukan nilai-nilai estetika, etika dan spiritualis yang tumbuh dari budaya masyarakat Jawa. Pada konteks legenda, sistem dominasi terlihat melalui pola penceritaan yang menempatkan tokoh laki-laki sebagai figur sentral dan pengendali keputusan, sementara perempuan ditempatkan sebagai sosok yang harus mengikuti aturan sosial. Melalui pengulangan narasi demikian, legenda menjadi sarana pewarisan nilai yang mempertahankan struktur kekuasaan dalam masyarakat.

Dari perspektif feminis kontemporer, sistem dominasi berkaitan erat dengan cara patriarki bekerja melalui representasi budaya. Fakih (2016) menjelaskan bahwa dominasi ini terbentuk ketika laki-laki diberi hak lebih untuk mengatur, mendefinisikan, dan menentukan peran perempuan dalam teks maupun

kehidupan sosial. Bahwa legenda dan folklor sering menghadirkan perempuan sebagai tokoh pasif atau korban keadaan, sehingga suara mereka terpinggirkan dalam narasi. Dengan demikian, representasi dalam cerita legenda bukan sekadar bentuk hiburan tradisional, tetapi juga sarana penyebaran dan pelanggan nilai yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dari generasi ke generasi.

#### 4. Gender dan Feminisme

Kajian gender dan feminisme merupakan dasar penting untuk memahami kedudukan perempuan dalam karya sastra maupun kebudayaan. Gender tidak sekadar menunjuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga pada konstruksi sosial yang melekat pada peran, fungsi, dan harapan masyarakat terhadap keduanya. Fakih (2016) menegaskan bahwa ketimpangan gender umumnya lahir dari sistem sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah, baik dalam lingkup domestik maupun ruang publik.

Di sisi lain, feminisme hadir sebagai gerakan sekaligus pendekatan analitis yang memperjuangkan kesetaraan serta menolak dominasi patriarki yang membatasi perempuan. Tong dalam Janna, et al. (2025) menjelaskan bahwa feminisme berupaya membongkar struktur ideologis yang mengekang perempuan melalui berbagai aliran pemikiran, seperti feminisme liberal, radikal, marxis, hingga postmodern. Dalam ranah kesusastraan, perspektif feminis digunakan untuk mengkaji bagaimana tokoh perempuan ditampilkan—apakah sebagai figur yang mandiri dan berdaya, atau justru direduksi melalui stereotip, subordinasi, dan marginalisasi.

Kajian feminisme dalam tradisi sastra lisan menjadi sangat signifikan, mengingat cerita rakyat sering kali mencerminkan nilai budaya masyarakat yang kental dengan nuansa patriarkis. Sugiarti

(2021) menyatakan bahwa perempuan dalam cerita rakyat kerap direpresentasikan sebagai sosok pasif, tunduk pada kuasa laki-laki, atau sekadar pelengkap narasi. Namun, ada pula kisah yang menampilkan perempuan sebagai tokoh bijak, tangguh, dan berperan penting dalam jalannya cerita. Perbedaan representasi tersebut menunjukkan bahwa citra perempuan dibentuk berdasarkan nilai budaya dan ideologi yang hidup dalam masyarakat pada masa itu.

a. Gender

Konsep gender merujuk pada konstruksi mengenai peran, perilaku dan ekspektasi yang diletakkan kepada laki-laki dan Perempuan. Menurut Fakih (2015), gender berbeda dengan jenis kelamin gender dibentuk melalui proses sosial, budaya dan historis yang kemudian menciptakan peran berbeda bagi laki-laki dan Perempuan. Dengan demikian, gender menjadi dasar bagi munculnya keikutsertaan karena Masyarakat sering menempatkan Perempuan sebagai pihak subordinat melalui pembatasan peran dan kapasitas.

Pandangan ini diperkuat oleh Butler dalam Sumardiono (2022) yang menyatakan bahwa gender merupakan performativitas, yaitu sesuatu yang dibentuk melalui tindakan berulang dan bukan identitas yang tetap. Masyarakat terus-menerus memproduksi norma gender melalui bahasa, perilaku dan institusi sehingga identitas gender seolah-olah tampak alami. konsep ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender muncul dari proses penormaan yang mengatur bagaimana individu “seharusnya” bersikap berdasarkan jenis kelaminnya. Dengan kata lain, ketidaksetaraan bukan terjadi secara biologis, tetapi terbentuk melalui struktur sosial yang diinternalisasi sejak kecil.

b. Feminisme

Feminisme merupakan suatu pendekatan teoritis, gerakan sosial, dan kerangka analisis yang berfokus pada upaya menghapus ketidakadilan gender dan menentang dominasi patriarki. Menurut Fakih (2015), bahwa feminisme hadir sebagai kritik terhadap struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat melalui pembatasan akses, kesempatan, dan peran. Ia menekankan bahwa feminisme tidak hanya menyoroti ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berupaya membongkar konstruksi sosial yang melanggengkan diskriminasi. Dalam perspektif ini, feminisme dipahami sebagai gerakan transformatif yang mendorong perubahan sistemik demi terwujudnya relasi gender yang adil.

Selain itu, Hook Dalam (Atabau, 2025) menambahkan bahwa feminisme harus dipahami sebagai usaha kolektif untuk mengakhiri seksisme, eksploitasi gender, dan penindasan dalam segala bentuknya. Hooks menolak pemahaman feminisme yang hanya berfokus pada perempuan kelas menengah, karena menurutnya feminisme harus mengakomodasi pengalaman perempuan dari berbagai latar sosial, ekonomi, dan rasial. Sejalan dengan itu, menurut (Solikhah, 2025) bahwa feminisme kontemporer berorientasi pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, partisipasi politik, dan penguatan kapasitas sosial. Dengan demikian, feminisme modern tidak hanya berfungsi sebagai teori kritis, tetapi juga sebagai kerangka perjuangan yang menuntut kesetaraan struktural dan kultural dalam masyarakat.

## 5. Kajian Teori Feminisme

Teori feminisme merupakan perspektif teoritis yang menyoroti adanya ketimpangan antar gender serta memperjuangkan terciptanya relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan. Gerakan ini menegaskan bahwa ketidakseimbangan gender bukan sesuatu yang bersifat alamiah, melainkan hasil dari konstruksi sosial, budaya dan praktik patriarki yang mengatur posisi Perempuan dalam Masyarakat. Menurut Tong dalam Janna, et al. (2025) feminisme lahir dari kritik terhadap sistem sosial yang secara turun-temurun menempatkan Perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan dan ruang public. Dengan demikian, feminisme menawarkan perangkat konseptual untuk memahami dan mengurai bentuk ketidakadilan yang dialami Perempuan secara terstruktur.

Menurut Fakih (2016), ketidakadilan gender dapat muncul melalui berbagai mekanisme seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan hingga beban ganda yang membatasi kesempatan perempuan di dalam masyarakat. Aliran feminisme memberi sudut pandang berbeda dalam memaknai akar persoalan tersebut. Feminisme radikal menganggap bahwa akar opresi adalah patriarki, sedangkan feminisme liberal menekankan pentingnya perubahan kebijakan agar perempuan memperoleh akses yang sama. Di sisi lain, feminisme post strukturalis terutama melalui pemikiran Mills menitikberatkan analisis pada bahasa dan wacana. Menurut Mills (2017) cara perempuan ditempatkan sebagai subjek atau objek dalam teks menjadi indikator penting untuk melihat pola representasi dan relasi kuasa.

Oleh karena itu, feminisme tidak hanya membahas aspek sosial dan politik, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka analisis dalam mengkaji bagaimana perempuan direpresentasikan dalam teks sastra, media, maupun praktik budaya lainnya. Pendekatan ini

membantu peneliti mengidentifikasi bentuk-bentuk dominasi yang bekerja secara halus melalui bahasa, struktur narasi, dan pola penggambaran peran. Pemanfaatan teori feminisme dalam penelitian mutakhir menjadi relevan karena mampu mengaitkan pengalaman perempuan dengan struktur sosial dan konstruksi wacana secara lebih komprehensif.

a. Teori Feminisme Liberal

Feminisme liberal awalnya diperkenalkan oleh Mary Wollstonecraft melalui karyanya "*A Vindication of the Rights of Women*" pada abad ke-18, kemudian diperkaya oleh pemikiran John Stuart Mill dalam karyanya yang berjudul "*The Subjection of Women*" pada abad ke-19. Gagasan ini juga dikembangkan lebih lanjut oleh Betty Friedan melalui tulisannya seperti "*The Feminine Mystique*" dan "*The Second Stage*". Aliran ini berpendapat bahwa akar dari subordinasi Perempuan terletak pada berbagai pembatasan hak serta norma sosial yang menghalangi Perempuan untuk berpartisipasi di ranah public. Masyarakat kerap memandang Perempuan sebagai individu yang memiliki kapasitas intelektual dan fisik yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga dianggap tidak layak atau tidak mampu mengambil peran di ruang public.

★ Pandangan bahwa perempuan memiliki kecerdasan dan kemampuan fisik yang lebih rendah daripada laki-laki ditolak oleh feminisme liberal. Aliran ini berpegang pada prinsip-prinsip liberal mengenai hakikat manusia, yang menyatakan bahwa perbedaan utama antara manusia dan hewan terletak pada sejumlah kemampuan khas manusia, terutama rasionalitas. Rasionalitas tersebut terdiri atas dua dimensi, yaitu moralitas kemampuan membuat keputusan secara mandiri dan prudensialitas kemampuan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Berdasarkan pemikiran tersebut, feminisme liberal menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan setara, memiliki hak yang sama, serta berhak

memperoleh peluang yang setara untuk mengembangkan potensi diri.

Feminisme liberal berpendapat bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memberi ruang kepada setiap individu untuk mengekspresikan otonomi dirinya serta memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam pandangan liberal, hak individu ditempatkan sebagai prioritas utama dibandingkan konsep “kebaikan” atau kepentingan kolektif. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hak merupakan fondasi bagi seseorang untuk menentukan pilihan terbaik bagi dirinya selama tidak melanggar atau mengganggu hak orang lain.

Pemikiran feminisme liberal yang mula-mula dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft dalam “*A Vindication of the Rights of Women*” menolak anggapan bahwa perempuan secara alami memiliki kemampuan intelektual maupun fisik yang lebih rendah daripada laki-laki. Wollstonecraft menegaskan bahwa perempuan hanya dapat berkembang setara dengan laki-laki jika memperoleh akses pendidikan yang sama. Pandangan tersebut kemudian dilanjutkan dan diperluas oleh J. S. Mill dan Harriet Taylor-Mill sekitar satu abad kemudian. Keduanya menyatakan bahwa kesetaraan gender tidak hanya menuntut persamaan pendidikan, tetapi juga membutuhkan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi serta memperoleh hak-hak sipil yang setara. Menurut Junaedi & Law (2024) bahwa setiap individu berhak mengejar tujuan personalnya, sepanjang hal itu tidak menghambat hak dan kebebasan individu lainnya .

#### b. Teori Feminisme Radikal

Feminisme radikal mulai berkembang pada pertengahan tahun 1970-an. Aliran ini menghadirkan ideologi perjuangan yang bercorak separatis bagi perempuan. Menurut Daryono & Fedryansyah (2019) dasar pemikiran feminisme radikal bertumpu pada dua prinsip utama: pertama, perempuan memiliki nilai-nilai

positif yang melekat dan harus ditegaskan sebagai bentuk perlawanan terhadap kecenderungan universal yang merendahkan perempuan; kedua, penindasan terhadap perempuan terjadi secara global sebagai dampak dari dominasi sistem patriarki.

Fakih (2013) menyatakan bahwa feminisme radikal muncul sebagai respons terhadap budaya seksisme dan diskriminasi berbasis gender yang berkembang di Barat pada era 1960-an. Aliran ini memainkan peran penting dalam memperjuangkan penanggulangan kekerasan seksual dan menolak pornografi. Kemunculannya tidak lepas dari ketidakpuasan sejumlah feminis yang merasa tidak terakomodasi dalam feminisme liberal, terutama karena persoalan ras, kelas, serta penolakan terhadap kekerasan yang dilakukan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Feminisme radikal berusaha mewujudkan kesetaraan gender yang sejati dengan cara menyingkirkan sistem patriarki yang dianggap sebagai sumber utama penindasan perempuan. Dalam pandangan ini, tubuh perempuan diposisikan sebagai objek kekuasaan laki-laki, sehingga isu-isu seperti hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, serta relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki menjadi fokus utama perjuangannya.

★ Menurut Eriyanti (2017) feminisme radikal juga memperluas makna politik melampaui batas politik formal dan institusi publik seperti negara, dengan memasukkan ranah privat termasuk kehidupan keluarga dan seksualitas sebagai ruang terjadinya ketidakadilan gender dan pembentukan identitas perempuan. Tong dalam Kurnianto (2017) menjelaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai feminis radikal apabila ia meyakini bahwa sistem seks/gender merupakan faktor utama yang menentukan perlakuan terhadap perempuan. Feminisme radikal berangkat dari keyakinan tersebut dan mendasari analisis mereka terhadap penindasan Perempuan, antara lain:

1. Perempuan secara historis menjadi kelompok yang pertama kali diperlakukan tidak adil,
2. Perlakuan tidak adil terhadap perempuan sangat luas dan terdapat di hampir setiap Masyarakat
3. Perlakuan tidak adil terhadap perempuan sangat dalam, yang berarti bahwa ini merupakan bentuk perlakuan yang sulit dihapuskan dan tidak dapat dihilangkan dengan perubahan sosial lainnya, seperti penghapusan masalah kelas
4. Perlakuan tidak adil terhadap perempuan menimbulkan penderitaan yang buruk, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, meskipun penderitaan tersebut tidak disadari karena adanya prasangka seksis, baik dari pihak pelaku maupun korban,
5. Perlakuan tidak adil terhadap perempuan memberikan model konseptual untuk memahami bentuk perlakuan yang tidak adil lainnya.

Sistem seks/gender dipandang sebagai akar utama dari perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Sistem tersebut merupakan seperangkat aturan sosial yang berfungsi mengubah seksualitas biologis menjadi konstruksi budaya yang dibentuk melalui aktivitas manusia. Gerakan feminisme radikal melihat bahwa perjuangan melawan penindasan perempuan dapat dilakukan melalui tindakan yang bersifat sangat personal, yakni melalui pengalaman subjektif masing-masing perempuan. Meskipun sering menuai kritik, aliran ini memberikan kontribusi penting bagi gerakan perempuan secara luas. Gagasan mereka bahwa “yang personal adalah politis” membuka ruang bagi perempuan untuk memahami pengalaman sehari-hari sebagai bagian dari persoalan politik yang lebih besar. Slogan ini menegaskan bahwa berbagai masalah pribadi yang dihadapi perempuan sepanjang hidupnya bukan disebabkan oleh kelemahan individu, melainkan merupakan

konsekuensi dari penindasan yang terjadi secara terstruktur dan sistematis.

Menurut Tong dalam Kurniant (2017) feminisme radikal terbagi menjadi dua arus utama, yakni radikal libertarian dan radikal-kultural. Keduanya sama-sama menyoroti adanya relasi kuasa yang menekan perempuan dalam setiap interaksi sosial dengan laki-laki. Namun, keduanya berbeda dalam menentukan akar persoalannya. Feminisme radikal-libertarian menilai bahwa penindasan muncul dari sistem seksualitas patriarki yang membatasi hasrat dan kenikmatan seksual semua individu. Sebaliknya, feminisme radikal-kultural menekankan bahwa objektifikasi seksual di mana laki-laki diposisikan sebagai subjek dan perempuan sebagai objek menjadi fondasi munculnya berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan.

Meskipun berbeda titik tekan, kedua perspektif tersebut sepakat bahwa relasi heteroseksual selama ini tidak setara dan mengandung diskriminasi. Karena itu, perempuan dipandang perlu merebut kembali kuasa atas tubuh dan seksualitasnya agar hubungan seksual dapat berlangsung secara setara, didasarkan pada persetujuan, serta berorientasi pada kepuasan kedua belah pihak. Dalam pandangan feminisme radikal-libertarian, penting bagi perempuan untuk menegaskan kembali otoritas atas seksualitas mereka dan menghadirkan representasi seksualitas perempuan yang selama ini terhapus dalam budaya patriarki.

### c. Teori Feminisme Sosialis

Feminisme sosialis berangkat dari pemahaman bahwa penindasan terhadap perempuan tidak hanya bersumber dari konstruksi gender, tetapi juga dari struktur ekonomi. Dalam perspektif ini, perempuan dipandang sebagai kelompok ekonomi dalam tradisi pemikiran Marx dalam Gimenez dan Martha A (2016) sekaligus sebagai “kelas seks” sebagaimana dikemukakan oleh

Shulamith Firestone. Konsekuensinya, perempuan dianggap menyumbang tenaga yang sangat penting bagi keberlangsungan sistem kapitalis, baik melalui kerja produktif di ruang publik maupun melalui kerja domestik sebagai istri dan pengelola rumah tangga yang tidak memperoleh imbalan.

Menurut feminis sosialis, perempuan mengalami penindasan ganda yang bersumber dari dua sistem dominan, yakni patriarki dan kapitalisme. Aliran ini berkembang sebagai kritik terhadap feminisme Marxis yang beranggapan bahwa patriarki muncul belakangan dan akan hilang ketika kapitalisme runtuh. Sebaliknya, feminis sosialis menegaskan bahwa patriarki telah ada jauh sebelum kapitalisme dan akan tetap bertahan kecuali dilakukan perubahan mendasar terhadap relasi kuasa yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Oleh karena itu, kritik terhadap dominasi dan kontrol terhadap perempuan dipandang sebagai langkah penting untuk menghapus ketidakadilan gender secara struktural.

Feminisme sosialis mulai berkembang pada dekade 1970-an dan dipahami sebagai perpaduan antara pendekatan materialisme historis Engels dengan gagasan “the personal is political” yang dikemukakan oleh feminis radikal. Meskipun aliran ini memiliki kedekatan dengan sosialisme, para feminis sosialis menilai bahwa analisis Marx belum cukup memberi perhatian pada bentuk penindasan dan perbudakan terhadap perempuan. Karena itu, mereka menegaskan prinsip bahwa tidak mungkin tercipta kebebasan sosial tanpa pembebasan perempuan, dan sebaliknya, pembebasan perempuan tidak dapat dicapai tanpa perubahan sosialisme yang menyeluruh.

Tujuan utama feminisme sosialis adalah menghapus sistem kepemilikan yang dianggap melanggengkan ketimpangan, termasuk institusi perkawinan yang dinilai melegalkan kontrol laki-laki atas harta dan bahkan atas tubuh serta kehidupan istri. Pandangan ini

sejalan dengan gagasan Marx tentang masyarakat tanpa kelas dan tanpa hierarki gender. Feminisme sosialis melihat kapitalisme dan patriarki sebagai dua sistem ideologis yang saling berkaitan dan bersama-sama memproduksi penindasan terhadap perempuan. Menurut Tong dalam Kurnianto (2017) ada dua pendekatan: teori sistem ganda yang memisahkan analisis antara kapitalisme dan patriarki sebagai dua struktur berbeda yang menindas perempuan, serta teori sistem menyatu yang memandang keduanya terjalin dalam satu kesatuan sistem penindasan yang menyeluruh.

Menurut Marx dalam Gimenez, Martha A (2016) faktor ekonomi merupakan elemen paling fundamental yang membentuk struktur sosial dan kebudayaan masyarakat. Cara manusia memproduksi kebutuhan hidupnya dan bagaimana proses produksi tersebut berlangsung menentukan pola hidup serta relasi sosial yang muncul. Sementara itu, Engels menekankan bahwa keberlangsungan keluarga inti bergantung pada kontribusi laki-laki dan perempuan, tetapi pembagian peran tradisional menyebabkan ketimpangan: perempuan ditempatkan pada pekerjaan domestik seperti mengurus rumah dan menyediakan makanan, sementara laki-laki bertugas mencari nafkah. Pembagian kerja ini membuat laki-laki menguasai lebih banyak sumber daya ekonomi sehingga posisi perempuan menjadi lebih lemah dalam struktur sosial.

Feminisme sosialis berupaya mencapai kesetaraan melalui perubahan distribusi modal dan kekuasaan. Aliran ini menuntut kelas borjuis sebagai pemilik modal untuk tidak melakukan diskriminasi dalam pemberian upah antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menyediakan hak-hak kerja yang relevan dengan kebutuhan biologis dan sosial perempuan, termasuk cuti melahirkan dan menyusui. Fokus utama feminisme sosialis adalah mengkaji keterkaitan antara kerja domestik yang tidak dibayar dengan kerja upahan, atau dalam kajian sosiologi disebut sebagai hubungan

antara ranah keluarga dan dunia kerja. Pendekatan ini menegaskan bahwa ketimpangan gender tidak dapat dipahami hanya melalui satu struktur, tetapi harus dilihat dari interaksi antara patriarki dan kapitalisme yang secara bersamaan memperkuat penindasan terhadap perempuan.

Proses penyadaran ini menjadi inti dari feminisme sosialis, karena banyak perempuan belum menyadari bahwa mereka termasuk kelompok yang mengalami penindasan. Aliran ini mengintegrasikan analisis kelas dan gender untuk memahami mekanisme penindasan terhadap perempuan. Feminisme sosialis sejalan dengan feminisme Marxis yang menekankan kapitalisme sebagai sumber utama ketidakadilan, namun sekaligus sejalan dengan feminisme radikal yang menyoroti peran patriarki dalam menindas perempuan. Menurut Larasati (2023) kapitalisme dan patriarki dipandang sebagai dua kekuatan yang saling memperkuat dalam memproduksi ketidaksetaraan gender.

Sebagai contoh, kondisi di Amerika Serikat, di mana struktur keluarga dipimpin oleh laki-laki dan ekonomi formal dikendalikan oleh negara. Dalam konteks ini, peran sebagai warga negara dan pekerja dianggap sebagai ranah maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengasuh anak dikaitkan dengan ranah feminin. Pandangan ini menegaskan bagaimana pembagian peran berbasis gender dan struktur sosial-ekonomi saling berinteraksi dalam memperkuat subordinasi perempuan.

#### d. Teori Feminisme Eksistensial

Feminisme eksistensial berakar dari karya Simone de Beauvoir yang berjudul *The Second Sex*. Simone berpendapat bahwa tidak ada individu yang lahir secara inheren sebagai perempuan; seseorang dikategorikan sebagai perempuan karena proses sosial dan pengalaman hidup yang dijalani, bukan semata-mata karena faktor biologis, psikologis, atau ekonomi. Tong dalam Kurnianto

(2017) menjelaskan bahwa meskipun teori psikoanalisis Freudian, ekonomi Marxis, dan biologi menawarkan penjelasan mengenai ketertindasan perempuan, filsafat eksistensial memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci mengenai fenomena tersebut.

Simone menolak teori Freud yang menyatakan bahwa perempuan menempati posisi sosial yang rendah karena tidak memiliki penis. Menurutnya, rasa iri perempuan terhadap laki-laki bukan muncul dari ketidakmampuan biologis, melainkan keinginan atas keuntungan psikologis dan material yang melekat pada kekuasaan laki-laki. Dengan demikian, inferioritas perempuan bukan ditentukan oleh anatomi yang dianggap “tidak sempurna”, melainkan oleh ketidakmampuan perempuan mengakses dan menguasai kekuasaan dalam struktur sosial.

Beauvoir (2022) juga menolak penjelasan teori Marxis mengenai inferioritas perempuan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan muncul akibat pembagian kerja yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan Marxis, laki-laki bekerja di ranah publik dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri serta menguasai alat produksi, sementara perempuan terbatas pada pekerjaan domestik seperti mengurus anak dan memasak, sehingga menempatkan perempuan pada posisi subordinat sebagai kaum proletar. Selain itu, alasan lain yang sering dikemukakan adalah pandangan bahwa laki-laki, sebagai subjek yang berani mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran, memosisikan perempuan sebagai objek yang hanya berperan memberikan kehidupan.

Menurut Simone, penyebab utama diskriminasi terhadap perempuan bukan berasal dari faktor biologis atau ekonomi, melainkan dari sistem patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dalam masyarakat. Dunia perempuan selalu

dilihat dari perspektif laki-laki dan dijadikan objek penguasaan, sehingga peran perempuan dalam ranah publik sering diabaikan. Posisi inferior perempuan bukanlah sifat alami, melainkan akibat struktur kekuasaan yang dikuasai laki-laki, di mana semua aspek kehidupan dinilai dari sudut pandang laki-laki.

Simone menekankan bahwa perempuan sering diposisikan sebagai "the other", sementara laki-laki memiliki kendali penuh atas berbagai keputusan. Analisis eksistensialisnya menunjukkan bahwa perempuan dipandang tidak penting dan menjadi objek laki-laki. Dalam kerangka ini, menurut Siswadi et al. (2022) konsep transenden dan imanen digunakan untuk menjelaskan pembagian ruang aktivitas: perempuan berada di ranah imanen, yaitu ruang privat seperti pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki berada di ranah transenden, yang mencakup aktivitas publik, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Pandangan ini menegaskan perbedaan peran dan aktivitas berdasarkan gender, di mana perempuan dianggap pasif dan laki-laki aktif.

e. Teori Feminisme Marxis

Feminisme Marxis menyatakan bahwa penindasan perempuan terkait erat dengan sistem ekonomi kapitalis. Menurut Engels dalam Saulnier (2013), pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di masyarakat tradisional di mana laki-laki bekerja di ranah publik dan perempuan terbatas pada pekerjaan domestik menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Perempuan menjadi kelompok yang terpinggirkan karena tidak memiliki akses terhadap alat produksi dan sumber daya ekonomi, sehingga dominasi laki-laki dalam ranah publik dan kepemilikan harta terus diperkuat.

Menurut Shulamith Firestone dalam Rosa, Astin Julia, et al. (2022) perempuan juga merupakan "kelas seks" yang berperan penting dalam mendukung kapitalisme. Baik melalui pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar maupun sebagai pekerja berupah

rendah, perempuan menyediakan tenaga kerja yang menopang sistem kapitalis. Dengan demikian, penindasan terhadap perempuan tidak hanya berasal dari struktur sosial atau budaya, tetapi juga dari hubungan ekonomi yang menempatkan perempuan pada posisi inferior.

Dari perspektif feminisme Marxis, transformasi ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan gender. Hubungan antara kerja domestik dan kerja upahan harus dianalisis secara bersamaan untuk memahami bagaimana kapitalisme menghasilkan subordinasi perempuan. Feminisme Marxis menekankan bahwa selama struktur ekonomi tetap hierarkis dan patriarki, kesetaraan gender sejati tidak dapat tercapai.

#### f. Teori Feminisme Kultural

Feminisme kultural menekankan pentingnya mengakui nilai-nilai dan karakter khas perempuan sebagai kekuatan positif yang harus dihargai dalam masyarakat. Menurut Tong dalam Kurnianto (2017) aliran ini berfokus pada kualitas-kualitas yang diasosiasikan dengan perempuan, seperti empati, kepedulian, dan kemampuan membangun relasi interpersonal, yang selama ini sering diremehkan atau dianggap sekunder dibandingkan karakter maskulin. Feminisme kultural berupaya menyoroti kontribusi perempuan dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik, serta menolak pandangan yang menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap atau objek.

Feminisme kultural melihat pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan dan kekuatan. Aliran ini menekankan bahwa penghargaan terhadap peran tradisional perempuan, seperti dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak seharusnya dianggap lemah atau inferior, melainkan merupakan aspek penting dari konstruksi sosial yang memberi keseimbangan dan keberlanjutan masyarakat. Dengan demikian, feminisme kultural menekankan perlunya

menghargai peran perempuan, bukan menolak atau menyeimbangkan dengan atribut laki-laki saja.

Lebih lanjut, feminisme kultural juga mengkritik dominasi patriarki yang cenderung menganggap nilai dan pengalaman perempuan sebagai tidak penting. Aspek positif perempuan, aliran ini berusaha menciptakan paradigma sosial yang menghargai sifat-sifat yang selama ini diasosiasikan dengan feminitas. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang lebih inklusif, di mana kontribusi perempuan diakui setara dengan kontribusi laki-laki dalam ranah publik maupun privat.

g. Teori Feminisme Post Strukturalis

Feminisme post strukturalis menekankan pentingnya bahasa, wacana, dan representasi dalam membentuk posisi perempuan dalam masyarakat. Menurut Tong dalam Kurnianto (2017) aliran ini berfokus pada bagaimana konstruksi sosial melalui bahasa dan wacana menentukan identitas gender, peran, dan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Feminisme post strukturalis menolak pandangan bahwa identitas perempuan bersifat tunggal atau tetap, melainkan melihat identitas gender sebagai sesuatu yang fleksibel, diproduksi, dan terus berubah melalui praktik sosial dan wacana budaya.

Mills (2008) menegaskan bahwa wacana memiliki peran sentral dalam marginalisasi perempuan. Analisis wacana feminis post strukturalis bertujuan mengungkap bagaimana teks, media, dan komunikasi publik memposisikan perempuan dalam relasi subordinatif. Misalnya, representasi perempuan dalam literatur, media, atau pendidikan sering menegaskan stereotip tertentu yang memperkuat dominasi laki-laki dan membatasi peran sosial perempuan. Dengan memahami mekanisme ini, feminisme post strukturalis membuka peluang bagi perempuan untuk menegosiasikan identitas dan memperluas ruang partisipasi

sosialnya.

Selain itu, feminisme post strukturalis juga menekankan pentingnya kritik terhadap asumsi universal yang berlaku dalam wacana patriarkal. Aliran ini mendorong analisis yang melihat interaksi antara bahasa, kekuasaan, dan identitas sebagai kunci memahami bagaimana subordinasi perempuan dipertahankan dan direproduksi. Dengan pendekatan ini, feminisme post strukturalis tidak hanya memusatkan perhatian pada struktur sosial formal, tetapi juga pada praktek sehari-hari yang membentuk dan menegaskan ketidaksetaraan gender.

#### h. Teori Objektivikasi

Objektivikasi merupakan proses di mana seseorang diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang memiliki kesadaran, kehendak, dan otonomi. Dalam konteks gender, hal ini sering menimpa perempuan, di mana tubuh, emosi, dan perilaku mereka dipandang sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan, dinilai, atau dimanfaatkan oleh pihak lain, terutama laki-laki. Akibatnya, perempuan kehilangan posisi subyektifnya dan hanya diakui sebagai objek yang memenuhi kebutuhan atau standar pihak lain, baik secara seksual, sosial, maupun budaya.

★ Menurut Fredrickson dan Roberts dalam Rahmawatie (2019) *Objectification Theory* menjelaskan bahwa objektivikasi perempuan tidak hanya terjadi pada tingkat interpersonal, tetapi juga diproduksi dan diperkuat oleh budaya, media, dan wacana publik. Fenomena ini berdampak pada psikologis perempuan, termasuk munculnya rasa malu, alienasi, dan berkurangnya kontrol terhadap tubuh sendiri. Dengan kata lain, objektivikasi membuat perempuan menilai diri mereka dari perspektif pihak lain, bukan dari sudut pandang subjektifnya sendiri.

Dalam perspektif feminisme radikal dan post strukturalis, objektivikasi dipandang sebagai mekanisme patriarki yang

mempertahankan dominasi laki-laki. Feminisme radikal menekankan bahwa tubuh perempuan sering dijadikan sarana kekuasaan laki-laki, sedangkan feminisme post strukturalis, seperti dikemukakan oleh Mills (2008), menyoroti peran wacana dan representasi media dalam membentuk pandangan masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai objek. Analisis terhadap objektifikasi menjadi penting untuk memahami bagaimana ketidaksetaraan gender dipertahankan secara sistematis.

## 6. Kajian Pembelajaran Teks Cerita Legenda

Pembelajaran teks cerita rakyat memegang peran penting dalam pendidikan menengah, baik dalam Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka, khususnya pada tingkat SMA/MA. Tujuan utama pembelajaran ini adalah agar siswa mampu memahami isi cerita, menganalisis struktur serta unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, serta menyerap nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Selain itu, menurut Kemendikbud (2022) pembelajaran teks cerita rakyat juga berfungsi untuk mengenalkan peserta didik pada kekayaan budaya lokal, termasuk tradisi lisan dan nilai-nilai yang membentuk identitas masyarakat.

★ Dalam perspektif literasi kritis, penggambaran tokoh perempuan dalam cerita rakyat dapat dimanfaatkan sebagai media untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu-isu gender. Cerita rakyat yang memuat stereotip, subordinasi, dan marginalisasi perempuan dapat dianalisis secara kritis sehingga siswa belajar menghargai kesetaraan gender dan memahami pengaruh konstruksi sosial terhadap peran perempuan. Menurut Risma, Abel Widiastira (2025) pendekatan ini juga mendukung pengembangan keterampilan literasi kritis siswa, meliputi membaca, menyimak, menulis, dan berbicara, sekaligus meningkatkan kemampuan menganalisis nilai-nilai budaya yang terdapat dalam teks.

Dengan demikian, penerapan kajian representasi perempuan dalam pembelajaran teks cerita rakyat tidak hanya memperluas pemahaman literasi sastra, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis dan kesadaran sosial siswa, selaras dengan tujuan pendidikan karakter yang tertuang dalam kurikulum nasional.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

1. Rohmah et all meneliti “Representasi Perempuan Dalam Cerpen “Mak Ipah Dan Bunga-Bunga” Karya Intan Paramadhita: Analisis Wacana Kritis Model Mills”

Hasil penelitian pada literatur tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) model Mills. Pendekatan ini menekankan pada analisis posisi subjek dan objek dalam teks, serta posisi penulis dan pembaca dalam membentuk makna. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu analisis teks cerpen “*Mak Ipah dan Bunga-Bunga*” karya Intan Paramadhita. Fokus penelitian terletak pada representasi perempuan, khususnya terkait ketidakadilan gender, marginalisasi, subordinasi, dan stereotip yang dialami tokoh perempuan dalam cerita. Hasil analisis menunjukkan bahwa tokoh perempuan dalam cerpen digambarkan sebagai korban ketidakadilan gender, yang meskipun terkadang menunjukkan bentuk perlawanan, hal tersebut umumnya hanya terjadi dalam pikiran mereka. Selain itu, posisi penulis-pembaca membuat pembaca cenderung menerima pandangan penulis mengenai pengalaman perempuan, sehingga wacana dalam teks mencerminkan nilai-nilai sosial yang membatasi peran dan eksistensi perempuan. Penelitian ini memberikan pemahaman bagaimana wacana kritis dapat digunakan untuk menganalisis representasi perempuan dalam sastra, khususnya dalam cerpen yang menjadi fokus studi.

2. Asyrah et all meneliti “Objektifikasi Perempuan Dalam Cerita Rakyat Mandar To Minjari Duyung, Samba’Paria, Mara’dia Jawa Dan I Pura Para’bue: Analisis Wacana Kritis Mills”

Hasil penelitian pada literatur menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) model Mills. pendekatan ini menekankan analisis terhadap posisi subjek dan objek dalam teks, serta bagaimana posisi penulis dan pembaca mempengaruhi pembentukan makna. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu analisis terhadap teks empat cerita rakyat Mandar, yaitu To Minjari Duyung, Samba’ Paria, Mara’dia Jawa, dan I Pura Para’bue. Fokus penelitian adalah objektifikasi perempuan, termasuk bentuk-bentuk marginalisasi, subordinasi, dan representasi perempuan sebagai tokoh yang tunduk atau pasif di hadapan laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam cerita-cerita tersebut, perempuan sering kali digambarkan sebagai objek yang memiliki ruang perlawanan yang sangat terbatas. Penelitian ini memberikan pemahaman bagaimana wacana kritis dapat diterapkan untuk menganalisis representasi perempuan dalam sastra, khususnya dalam konteks cerita rakyat Mandar.

3. Putikadyanto, et all. "Representasi Tokoh Perempuan dalam Cerita Pendek dalam Buku Teks SMA: Kajian Feminisme Norman Fairclough."

Hasil penelitian pada literatur menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) model Norman Fairclough. Pendekatan ini menekankan hubungan antara teks, praktik diskursus, dan konteks sosial, khususnya dalam hal ideologi gender. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu analisis cerita pendek yang terdapat dalam buku teks SMA. Fokus penelitian adalah representasi tokoh perempuan, termasuk bagaimana bahasa dan struktur teks membentuk stereotip gender, membatasi peran perempuan, dan menampilkan perempuan dalam posisi pasif. Hasil analisis menunjukkan bahwa tokoh perempuan dalam cerita pendek

tersebut sering digambarkan dalam peran tradisional yang terbatas, sehingga memperkuat stereotip gender. Penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan representasi gender yang adil dalam buku teks sebagai bagian dari pendidikan inklusif dan untuk mendorong pemahaman kritis terhadap isu-isu gender.

